

Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Temuan Audit dan Indikasi Korupsi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Muhammad Fajar Alhamdi^{1*}, Fefri Indra Arza², Ridha Azka Raga³

^{1, 2, 3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: muhammadfajaralhamdi@gmail.com

Tanggal Masuk:

29 Juli 2025

Tanggal Revisi:

12 November 2025

Tanggal Diterima:

30 Desember 2025

Keywords: *Audit Findings; Corruption Indications; Financial Performance; Good Governance; Local Government.*

How to cite (APA 6th style)

Alhamdi, M. F., Arza, F. I., & Raga, R. A. (2026). Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Temuan Audit dan Indikasi Korupsi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 8 (1), 183-196.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v8i1.3474>

Abstract

Local governments in West Sumatra Province will have their financial performance monitored from 2020 to 2024. The impact of good governance practices, audit findings, and corruption signs will be examined. The research uses a quantitative method, assessing data from 19 regencies/cities, and is motivated by repeated issues of budget mismanagement and insufficient oversight in places including Dharmasraya, Mentawai, and Padang. Sources of secondary data included government documents such as LKPD records, BPK audit reports, and KPK files. The audit results were collected from BPK evaluations, the Procurement Governance Index (ITKP) was used to measure good governance, and dummy variables derived from court orders were used to categorize corruption signals. Efficiency ratios were used to evaluate financial success. Financial performance is positively affected by good governance, according to the data, but audit findings and corruption indications have a negative effect. These results highlight the importance of effective anti-corruption enforcement, audit integrity, and high-quality governance in enhancing the financial results of the public sector. Enhancing fiscal accountability at the regional government level is the practical goal of this research, which also adds to the growing body of knowledge in public sector accounting.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah, tantangan utama pemerintah daerah bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melainkan juga mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas fiskal, penguatan tata kelola pemerintahan (*good governance*), efektivitas pengawasan melalui audit, serta upaya pemberantasan korupsi menjadi prasyarat utama dalam membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Provinsi Sumatera Barat,

terdiri 19 kabupaten/kota, mencerminkan kompleksitas tantangan ini. Dalam lima tahun terakhir, daerah ini kerap menjadi sorotan nasional akibat sejumlah kasus korupsi dan penyimpangan anggaran bernilai miliaran rupiah, seperti yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, dan proyek Gedung Kebudayaan Sumatera Barat.

Kinerja keuangan pemerintah daerah sering kali dipengaruhi oleh berbagai variabel struktural dan kelembagaan, termasuk tingkat penerapan prinsip-prinsip. “*Good governance*”, hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan keberadaan indikasi korupsi. “*Good governance*” bisa meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan anggaran publik. Namun demikian, lemahnya pengawasan dan tingginya jumlah temuan audit serta merebaknya indikasi korupsi di beberapa daerah justru menjadi paradoks dalam proses reformasi birokrasi daerah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan instrumen pengawasan saja belum cukup untuk memastikan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah secara merata.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi simultan tiga variabel kunci penerapan *good governance*, temuan audit, dan indikasi korupsi ke dalam satu model analisis kuantitatif untuk menilai pengaruhnya kinerja keuangan pemerintah daerah Sumatera Barat. Pendekatan ini jarang dilakukan dalam studi sebelumnya, yang umumnya bersifat parsial atau hanya berfokus pada satu atau dua variabel. Selain itu, penggunaan data empiris terkini (periode 2020–2024) serta pemanfaatan indeks tata kelola pengadaan (ITKP), temuan audit BPK, dan kasus korupsi yang telah mencapai vonis hukum memberikan nilai tambah dalam validitas temuan.

Penelitian ini juga mengisi celah dalam literatur akademik yang masih minim menyoroti hubungan kausal antara kelemahan tata kelola dan efisiensi fiskal dalam konteks daerah dengan tingkat kerawanan korupsi yang tinggi. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menawarkan kontribusi konseptual terhadap teori keagenan dan tata kelola publik, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pengambil kebijakan daerah untuk merumuskan strategi penguatan sistem pengendalian intern dan pengawasan berbasis risiko.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Kerangka Teori keagenan “*agency theory*” Jensen dan Meckling (1976) memberikan perspektif yang berguna untuk memahami dinamika antara komunitas dan tingkat pemerintahan masing-masing, di mana tingkat pemerintahan tersebut bertugas mengelola dana publik secara efisien dan transparan. Ketidakseimbangan informasi, atau perbedaan tingkat pengetahuan antara agen dan prinsipal, merupakan sumber konflik kepentingan yang umum, meskipun kepentingan komunitas seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah daerah.

Ketika agen mempunyai informasi dan kewenangan lebih besar dibandingkan masyarakat, muncul potensi perilaku oportunistik seperti penyalahgunaan anggaran, manipulasi pelaporan keuangan, hingga praktik korupsi. Oleh karena itu, teori keagenan menekankan pentingnya adanya mekanisme pengendalian, baik internal maupun eksternal, guna memastikan bahwa agen bertindak selaras dengan kepentingan prinsipal Riska et al (2022).

Dalam kerangka ini, penerapan prinsip “*good governance*” menjadi instrumen kunci dalam mengurangi risiko penyimpangan oleh agen. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta penegakan hukum diyakini mampu membangun tata kelola pemerintahan yang sehat dan berintegritas Irayana et al (2024); Istiqomatunnisa et al (2017). Dengan “*good governance*” yang kuat, masyarakat memperoleh ruang untuk mengawasi, mengevaluasi, dan bahkan memberikan umpan balik terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Selain itu, temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berfungsi sebagai sarana kontrol eksternal dalam hubungan agensi. Laporan hasil audit tidak hanya mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah, tetapi juga menjadi indikator adanya penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan Tama dan Hadi (2018). Audit publik yang dilakukan secara berkala merupakan bentuk intervensi kelembagaan yang mampu memperkecil ruang gerak agen dalam melakukan pelanggaran.

Lebih jauh, indikasi korupsi yang ditemukan dalam laporan investigatif, media, dan data hukum menjadi bukti nyata dari kegagalan hubungan agensi. Ketika pengawasan lemah dan penerapan prinsip tata kelola tidak berjalan optimal, agen cenderung melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara/daerah, sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus korupsi di Sumatera Barat selama periode 2020–2024 Sastra (2021); Antoni (2024); Putra (2022).

Dengan demikian, teori keagenan memberikan kerangka analisis yang tepat untuk menjelaskan bagaimana ketidakseimbangan informasi, lemahnya pengawasan, serta tata kelola yang buruk dapat berujung pada rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerapan teori ini sangat relevan dalam menilai efektivitas sistem pengelolaan keuangan publik era desentralisasi fiskal.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi ukuran efektivitas serta efisiensi terhadap pengelolaan keuangan publik yang tercermin dalam pencapaian tujuan pembangunan, pelayanan publik, serta pemenuhan akuntabilitas fiskal Uthaylah (2022); Rumerung dan Alexander (2019). Pengukuran kinerja keuangan sering dilakukan melalui rasio efisiensi anggaran, yang menunjukkan proporsi realisasi belanja operasional terhadap penerimaan daerah. Rasio ini ialah indikator penting guna mengukur kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber daya agar optimal tanpa pemborosan.

Good Governance

Konsep “*good governance*” mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta penegakan hukum. Menurut UNDP dan Bank Dunia, “*good governance*” yakni kerangka tata kelola yang menjamin penggunaan kekuasaan secara sah, adil, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan *good governance* yang efektif terbukti memperbaiki efisiensi belanja dan meningkatkan kepercayaan publik Irayana et al (2024); Amyulianthy et al (2023). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten mampu menekan kebocoran anggaran dan memperbaiki kinerja fiskal.

Temuan Audit

Temuan audit merupakan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah oleh BPK mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi perundang-undangan. Banyaknya temuan audit umumnya menunjukkan kelemahan pengendalian internal dan rendahnya integritas dalam pengelolaan anggaran Noviyanti dan Kiswanto (2016). Penelitian oleh Tama dan Hadi (2018) menegaskan bahwa frekuensi dan nilai temuan audit memiliki dampak negatif kinerja keuangan daerah, karena menunjukkan potensi pemborosan dan inefisiensi.

Indikasi Korupsi

Korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah mencerminkan kegagalan sistem pengawasan dan lemahnya penegakan hukum. “*World Bank*” menjelaskan korupsi ialah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Dalam kajian akademik, indikasi korupsi yang tinggi berkorelasi dengan rendahnya efektivitas anggaran dan berkurangnya rasio

efisiensi keuangan Wicaksono dan Prabowo (2022). Teori *fraud triangle* juga menjelaskan bahwa tekanan, peluang, dan rasionalisasi menjadi faktor pendorong terjadinya korupsi. Indikasi korupsi yang diukur melalui laporan hukum dan audit investigatif ialah indikator penting menilai kinerja keuangan yang sesungguhnya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penerapan *good governance* mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan transparan, akuntabel, serta partisipatif. Prinsip-prinsip "*good governance*" seperti efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta supremasi hukum sangat penting dalam memastikan alokasi anggaran digunakan untuk kepentingan publik secara optimal. Menurut teori keagenan, penerapan tata kelola yang baik dapat meminimalkan perilaku oportunistik agen karena meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas.

Penelitian oleh Irayana et al. (2024) dan Indriana (2019) memaparkan bahwasannya penerapan "*good governance*" berdampak positif dalam peningkatan kinerja keuangan daerah, baik dari sisi efisiensi belanja maupun kualitas layanan publik. Di sisi lain, daerah yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten cenderung mengalami pemborosan anggaran dan rendahnya rasio efektivitas fiskal.

Dengan penjelasan di atas terdapat keterkaitan positif yang signifikan terhadap penerapan "*good governance*" dan kinerja keuangan pemerintah daerah, Maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran berdasarkan pemeriksaan BPK. Temuan yang tinggi, baik sisi jumlah maupun nilai rupiah, umumnya mengindikasikan kelemahan dalam pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap regulasi, atau praktik penggunaan anggaran yang tidak efisien.

Menurut Tama dan Hadi (2018) dan Kiswanto dan Fatmawati (2019), semakin besar temuan audit, maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah, Ini terjadi karena temuan audit sering kali berkaitan dengan praktik belanja yang tidak sesuai aturan, manipulasi realisasi anggaran, atau lemahnya pelaporan keuangan.

Dalam perspektif teori keagenan, banyaknya temuan audit dapat mencerminkan kegagalan pengawasan dan meningkatnya asimetri informasi antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat), yang berdampak negatif terhadap akuntabilitas dan efisiensi fiskal.

Terdapat korelasi terbalik yang jelas antara hasil audit dan kesuksesan keuangan pemerintah daerah. Maka, berikut adalah hipotesis penulis:"

H2: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Indikasi Korupsi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Korupsi ialah bentuk perilaku menyimpang muncul akibat lemahnya tata kelola dan pengawasan. Dalam teori keagenan, tindakan korupsi merupakan bentuk deviasi ekstrem dari peran agen yang seharusnya mewakili kepentingan publik. Indikasi korupsi, seperti penyalahgunaan dana operasional, pengadaan fiktif, atau proyek bermasalah, berdampak langsung pada menurunnya efisiensi anggaran dan rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Penelitian oleh Wicaksono dan Prabowo (2022) menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi berkorelasi negatif dengan kinerja keuangan daerah. Korupsi menyebabkan distorsi dalam alokasi anggaran, penurunan efisiensi belanja, dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian terdapat hubungan negatif yang signifikan antara

indikasi korupsi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Indikasi korupsi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan pada penelitian ini. Alasan pemilihan pendekatan kuantitatif yakni kemampuannya untuk mengukur hubungan antara variabel secara objektif melalui penggunaan data numerik dan prosedur statistik. Pemerintah kabupaten serta kota di Provinsi Sumatera Barat akan dipantau kinerjanya secara finansial dari tahun 2019 hingga 2023. Tujuan penelitian ini yakni guna mengetahui bagaimana “*good governance*” hasil audit, dan indikator korupsi mempengaruhi hasil tersebut.

Populasi dalam penelitian yakni semua pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Tujuan penelitian ini menjadi dasar pemilihan sampel, yang dilakukan memakai “*purposive sampling*”. Awalnya, sampel penelitian ini dibatasi pada pemerintah daerah yang memenuhi kriteria berikut: mereka memiliki laporan keuangan lengkap untuk periode 2019–2023, telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan laporan auditnya tersedia secara publik (LHP), memiliki bukti korupsi yang dapat digunakan dalam kasus pengadilan tingkat pertama, dan memiliki skor tinggi pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), yang mengukur sejauh mana “*good governance*” diterapkan.

Tabel 1
Kriteria pemilihan sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	19
2.	Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Indikasi Korupsi dan Skor Indeks Tata Kelola Pemerintahan selama periode penelitian (2020-2024)	(0)
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama periode penelitian (2020-2024)	(0)
Total sampel		19
Periode pengamatan sampel (19 x 5)		95
Total sampel akhir yang akan diteliti		95

Jenis data digunakan yakni data sekunder, yang merujuk pada informasi yang telah dipublikasikan dan berasal dari sumber resmi. Informasi mengenai “*good governance*” diperoleh dari laporan ITKP yang disusun dan diterbitkan oleh Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kami menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai sumber data hasil audit, serta situs web resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berita pers yang terverifikasi sebagai sumber data indikasi korupsi. Data mengenai kinerja keuangan diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini dapat diakses di situs web BPS Provinsi Sumatera Barat. Metode yang dipakai guna mengumpulkan data meliputi studi dokumentasi, yang melibatkan pembacaan laporan dan dokumen pemerintah, serta tinjauan literatur, yang mencari landasan teoritis dan kesamaan dari penelitian sebelumnya.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan daerah menggambarkan efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah. Efisiensi ini dinyatakan melalui rasio efisiensi anggaran, yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan pengeluaran untuk menghasilkan output maksimal dari pendapatan yang diperoleh.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Penerapan *Good Governance*

Good governance mencerminkan penerapan prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi publik, proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah. Pengukuran good governance menggunakan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dari LKPP, yang memiliki skala 0–100. Skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penerapan “good governance” yang lebih baik.

Temuan Audit

Ketika BPK memeriksa laporan keuangan dari pemerintah daerah, mereka mungkin mengidentifikasi tanda-tanda peringatan seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan, kelemahan dalam pengendalian internal, atau kemungkinan kerugian terhadap dana negara. Jumlah temuan yang tercatat dalam Laporan Audit BPK (LHP) merupakan ukuran keberhasilan audit. Manajemen fiskal yang kurang baik lebih mungkin ditandai dengan peningkatan jumlah temuan audit.

Indikasi Korupsi

Indikasi korupsi merupakan gambaran apakah suatu pemerintah daerah terlibat kasus korupsi selama periode observasi, yang telah diputus pada tingkat pengadilan pertama dan dapat diakses secara publik melalui dokumen resmi atau pemberitaan yang tervalidasi. Skala variabel dummy dapat digunakan untuk mengukur indikator korupsi; di wilayah di mana tidak ada kasus korupsi yang telah diputus di pengadilan tingkat pertama, indikator akan bernilai 0, dan di tempat-tempat di mana kasus-kasus tersebut telah diputus, indikator akan bernilai 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean Statistic	Std. Error	Std. Deviation
Good Governance	87	0,00	92,71	56,3959	2,50249	23,34171
Temuan Audit	87	4,00	24,00	13,7126	,44623	4,16214
Indikasi Korupsi	87	0,00	1,00	0,6897	0,04989	0,46532
Kinerja Keuangan Pemerintah	87	0,90	1,09	0,9998	0,00384	0,03578
Valid N (listwise)	87					

Sumber: Hasil olah data SPSS 2025

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif Tabel 2, informasi yang didapatkan adalah: Variabel “*good governance*” memiliki nilai minimum 0,00, nilai maksimum 92,71, nilai laju perubahan 56,3959, dan nilai simpangan baku 23,34171. Analisis variansi dalam uji audit dengan melihat nilai minimum 4,000, nilai maksimum 1,000, nilai rata-rata 13,7126, dan nilai simpangan baku 4,16214. Variabel indikasi korupsi, tidak ada nilai minimum 0,00, nilai maksimum 24.000, nilai rata-rata 0,6897%, dan nilai standar deviasi 0,46532. Pengelolaan keuangan pemerintah, dengan nilai minimum 0,90, nilai maksimum 1,09, rasio 0,9998, dan nilai simpangan baku 0,03578.

Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,00000000
	Std. Deviation	0,03407638
Most Extreme Differences	Absolute	0,063
	Postive	0,042
	Negative	-0,063
Test Statistic		0,063
Asymp. Sig (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

c. Lilliefors Significance Correction

d. This is a lower bound of the true significance

Sumber: Hasil olah data SPSS 2025

Dari Tabel 3 didapat nilai probabilitasnya yaitu sebesar $0,200 > \alpha$ (0.05), bisa disimpulkan bahwa residual data telah terdistribusi normal dan asumsi normalitas dalam penelitian ini tidak dipermasalahkan.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. (Constant)		
Good Governance	0,895	1,117
Temuan Audit	0,895	1,117
Indikasi Korupsi	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS 2025

Tabel 4 memperlihatkan nilai VIF dan toleransi untuk variabel “*good governance*” dan temuan audit masing-masing adalah 1,117 dan 0,895, sedangkan untuk variabel Indikasi Korupsi nilainya adalah 1,000 dan 1,000. Semua variabel lainnya memiliki nilai yang berbeda. Karena toleransi $> 0,10$ dan VIF < 10 , kedua nilai tersebut lulus uji multikolinearitas. Dengan demikian, jelas bahwa variabel independen tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas. Oleh karena itu, tidak ada pola korelasi yang jelas antara variabel independen studi ini.

Uji Autokorelasi

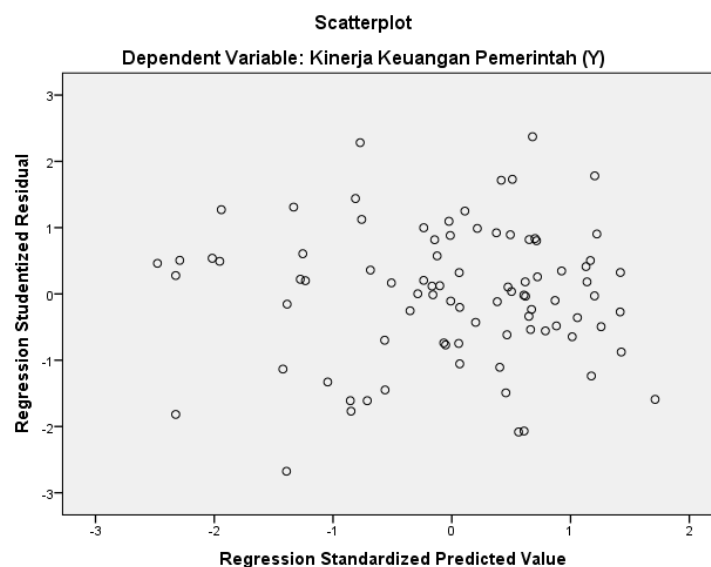
Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1.	0,305 ^a	0,093	0,060	0,03469	2,063
a. Predictors: (Constant), Indikasi Korupsi, <i>Good Governance</i> , <i>Temuan Audit</i>					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah					

Sumber: Hasil olah data SPSS 2025

Nilai 2.063 untuk Durbin-Watson (DW) tercantum dalam Tabel 5. Jika nilai DW berada antara 1.7232 dan 2.2768 untuk dU, sesuai dengan persyaratan "*uji Durbin-Watson*", maka model regresi dianggap bebas dari autokorelasi. Ketiadaan autokorelasi antara residu dalam model regresi studi ini didukung oleh fakta bahwa nilai 2.063 tetap berada dalam rentang tersebut.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa sebaran titik data tidak menunjukkan pola tertentu dan tersebar secara acak di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu X dan Y. Pola penyebaran ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam data yang dianalisis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas, yaitu *good governance*, temuan audit dan indikasi korupsi, tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1.	(Constant)	0,966	0,015		64,187	0,000
	Good Governance Temuan Audit Indikasi Korupsi	0,000	0,000	0,259	2,346	0,021
		0,001	0,001	0,098	0,883	0,380
		0,000	0,008	0,006	0,058	0,954

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS 2025

Berdasarkan persamaan pada tabel 6, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 0.966 memperlihatkan kinerja perusahaan akan sebesar 0.966 dalam kondisi tanpa adanya variabel independen.
2. Koefisien Regresi Tata Kelola yang Baik (β) dengan nilai koefisien 0.000. Artinya, dengan asumsi faktor lain tetap konstan, peningkatan satu unit dalam tata kelola yang baik akan menyebabkan kenaikan 0.000 dalam kinerja keuangan pemerintah.
3. Koefisien Regresi (β) Hasil Akhir Audit: Koefisien likuiditas sebesar 0,001. Artinya, dengan asumsi faktor lain tetap konstan, peningkatan satu unit pada variabel hasil audit akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,001 pada variabel kinerja keuangan pemerintah.
4. Nilai koefisien likuiditas sebesar 0,001 menunjukkan adanya korupsi dalam koefisien regresi (β). Artinya, dengan asumsi faktor lain tetap konstan, peningkatan satu unit pada variabel hasil audit akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,001 unit pada variabel kinerja keuangan pemerintah.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi R^2

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	0,305 ^a	0,093	0,060	0,03469

a. Predictors: (Constant), Indikasi Korupsi, Good Governance, Temuan Audit

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemrintah

Sumber: Hasil olah data SPSS 2025

Dari Tabel 7, nilai Adjusted R Square 0,060 atau 6% menunjukkan kemampuan prediksi model setelah disesuaikan dengan jumlah variabel serta ukuran sampel. Nilai Adjusted R Square yang tidak jauh berbeda dengan R Square mengindikasikan bahwa model cukup robust dan tidak mengalami overfittin.

Dari hasil uji dengan nilai 6%, artinya sebesar 94% variasi lainnya dalam variabel dependen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam analisis regresi ini. Nilai Adjusted R Square yang rendah seperti ini mengindikasikan bahwa model belum cukup baik menjelaskan hubungan antar variabel, serta kemungkinan masih banyak variabel penting lain yang belum dimasukkan dalam model.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1.	Regression	0,10	3	0,003	2,838	0,043 ^b
	Residual	0,100	83	0,001		
	Total	0,110	86			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Indikasi Korupsi, Good Governance, Temuan Audit

Sumber: Hasil olah data SPSS 2025

Dari Tabel 8 didapat nilai $F = 2,838$ dan signifikansi $0,043 < 0,05$, maka bisa dipahami bahwasannya variabel bebas bersamaan atau secara simultan mempunyai dampak signifikan pada kinerja perusahaan.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8
Hasil Uji t parsial

Hipotesis	t	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	64,187	0,000	
H1	2,346	0,021	diterima
H2	0,883	0,380	ditolak
H3	0,058	0,954	ditolak

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS 2025

1. Pengujian hipotesis 1, "Hipotesis pertama penelitian yaitu good governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa good governance memiliki β (koefisien regresi) sebesar 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 2,346, yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,66342 dan tingkat signifikansi $0,021 < 0,05$. Artinya bahwa secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima".
2. Pengujian hipotesis 2, "hipotesis kedua penelitian yaitu temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa temuan audit memiliki β (koefisien regresi) sebesar 0,001 dengan nilai t hitung sebesar 0,883, yang masih lebih kecil dari t tabel yaitu 1,66342 dan tingkat signifikansi $0,380 < 0,05$. Artinya bahwa secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak".
3. Pengujian hipotesis 3, "hipotesis ketiga penelitian yaitu indikasi korupsi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa indikasi korupsi memiliki β (koefisien regresi) sebesar 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 0,058, yang masih lebih kecil dari t tabel yaitu 1,66342 dan tingkat signifikansi $0,954 < 0,05$. Artinya bahwa secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H2) ditolak".

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tata kelola yang baik secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, menurut uji hipotesis pertama. Hal ini membuktikan (H1) **diterima**. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum merupakan karakteristik tata kelola yang baik, yang jika diterapkan sepenuhnya, berpotensi meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Data ini mendukung gagasan bahwa administrasi yang baik dapat menciptakan iklim administratif dan manajerial yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran regional. Partisipasi publik secara signifikan mempengaruhi kinerja fiskal pemerintah daerah, menurut studi terbaru (Duate, 2024), namun penguatan sistemik terhadap keterbukaan dan akuntabilitas diperlukan untuk efektivitas yang lebih besar.

Selain itu, (Wulandari & Prasetya, 2020) menyimpulkan bahwa *good governance* memainkan peran sentral dalam mendorong akuntabilitas keuangan daerah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Penelitian dari (Arifin & Kumalasari, 2019) juga mendukung argumen bahwa keterlibatan masyarakat dan penguatan sistem kontrol internal berdampak positif di kualitas laporan keuangan pemerintah.

Sesuai dengan studi-studi lain, penelitian ini memaparkan praktik “*good governance*” memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Irayana dkk., 2024; Amyulianthy dkk., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah daerah meningkat dan pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien ketika tata kelola yang bertanggung jawab, transparan, dan partisipatif diperkuat. Mengingat hal ini, upaya reformasi birokrasi dan peningkatan keterampilan pejabat negara harus difokuskan pada memastikan bahwa konsep tata kelola yang baik diterapkan secara menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis kedua (H2) memaparkan bahwasannya temuan audit berdampak negatif pada kinerja keuangan pemerintah. Maka, hipotesis kedua (H2) **ditolak**. Kinerja keuangan pemerintah tidak secara signifikan terpengaruh oleh peningkatan temuan audit. Sebaliknya, meskipun secara numerik terdapat kecenderungan pengaruh positif yang sangat kecil, hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan temuan audit mungkin belum cukup menjadi faktor yang memengaruhi secara langsung peningkatan atau penurunan kinerja keuangan pemerintah, atau bisa juga menunjukkan bahwa pemerintah menindaklanjuti temuan audit secara responsif sehingga kinerja tidak terganggu secara signifikan (Nugroho et al., 2018).

Hal ini mengonfirmasi hasil penelitian (Prasetyawati, 2024) yang menemukan bahwa hasil audit BPK tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi pemerintah daerah. Demikian pula, tidak ada korelasi yang signifikan secara statistik antara kinerja keuangan dan hasil audit, pendapat audit, atau ukuran pemerintah daerah, menurut penelitian (Listyasabila & Januarti, 2025). Menurut (Wahib & Rohman, 2025), saran audit dan adopsi standar akuntansi pemerintah gagal memberikan dampak signifikan terhadap opini audit atau kinerja keuangan.

Hasil audit memiliki dampak kecil terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah, menurut studi ini dan studi lain (Noviyanti & Kiswanto, 2016) dan (Wijayanti & Suryandari, 2020). Pemerintah daerah yang punya jumlah temuan audit yang banyak belum tentu mempunyai kinerja keuangan pemerintah daerah yang buruk. Pemerintah daerah dalam menjalankan kinerja keuangannya kurang dipengaruhi oleh hasil dari temuan audit. Pemerintah daerah tidak mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja keuangan sebagai respons terhadap perubahan dan kritik dari BPK; tindakan yang diambil hanyalah untuk memenuhi kewajiban. Pemerintah daerah mempunyai kinerja keuangan lebih baik dibanding daerah yang memiliki

jumlah temuan audit yang tinggi, karena jumlah temuan audit di daerah tersebut lebih sedikit. Selain itu, temuan studi ini bertentangan dengan temuan (Indriyani & Amalia, 2023). Temuan studi ini memperlihatkan kinerja pemerintah daerah menurun seiring meningkatnya jumlah temuan audit.

Pengaruh Indikasi Korupsi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja fiskal pemerintah menurun ketika terdapat tanda-tanda korupsi, menurut hipotesis ketiga studi ini. Hal ini membuat kami menyimpulkan bahwa (H3) **ditolak**. Berdasarkan temuan ini, tidak ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa adanya indikator korupsi berdampak di kinerja keuangan pemerintah.

Temuan ini konsisten dengan penelitian (Heriningsih, 2014) menjelaskan bahwasannya meskipun terdapat praktik korupsi atau temuan penyimpangan, hal tersebut tidak serta-merta berdampak langsung pada performa keuangan pemerintah daerah. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan akuntabilitas yang memungkinkan kinerja keuangan tetap terlihat baik meskipun terdapat dugaan penyimpangan administratif atau pengelolaan (Ahyaruddin & Amrillah, 2018) dan (Nasution, 2018). Hal ini diperkuat oleh hasil studi (Auditya & Lismawati, 2013) yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan memiliki peran mediasi terhadap pengaruh korupsi terhadap kinerja keuangan, yang artinya tanpa sistem pengawasan yang efektif, indikasi korupsi tidak otomatis tercermin dalam penurunan kinerja finansial daerah.

Meskipun (Arsandi, 2022) menemukan bahwa praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah secara signifikan meningkatkan korupsi di sektor swasta dan mempengaruhi realisasi pendapatan dan pengeluaran daerah, hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan tersebut. Hal ini semakin memperkuat gagasan bahwa korupsi masih luas diterima di Indonesia sebagai sarana untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi, meskipun hal ini sangat problematis dari sudut pandang hukum dan etika. (Setiyono, 2017).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan berikut ini diambil di temuan studi: Ketika “*good governance*” diterapkan, tata kelola regional juga menjadi lebih baik. Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terpengaruh secara negatif oleh audit. Tanda-tanda korupsi tidak berpengaruh pada kesuksesan keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan

Penelitian memiliki keterbatasan. Pertama, data digunakan bersifat sekunder sehingga tidak dapat menangkap aspek kualitatif seperti persepsi atau dinamika kelembagaan. Kedua, variabel *good governance* diukur melalui skor ITKP yang hanya mencerminkan aspek pengadaan barang/jasa. Ini tidak mencakup seluruh prinsip tata kelola seperti partisipasi publik atau efektivitas kebijakan anggaran. Demikian pula, pengukuran indikasi korupsi hanya berdasarkan kasus yang telah mencapai putusan pengadilan, sehingga belum mencerminkan potensi korupsi laten atau tidak terdeteksi. Ketiga, penelitian hanya mencakup 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat selama periode 2020–2024, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke daerah lain. Keempat, model regresi belum memasukkan faktor lain seperti kondisi politik lokal atau kapasitas fiskal yang juga berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel seperti transparansi anggaran, sistem pengawasan internal, kompetensi aparatur, dan kualitas pelayanan publik agar analisis terhadap kinerja keuangan lebih menyeluruh. Untuk mendapatkan generalisasi hasil yang lebih baik, penelitian sebaiknya dilakukan di berbagai provinsi dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Komparasi antar wilayah juga dapat memberikan wawasan baru terkait praktik tata kelola terbaik. Disarankan agar penelitian di masa depan menggunakan pendekatan longitudinal untuk melihat tren dan perubahan dari waktu ke waktu. Selain itu, kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*) dapat menggali informasi yang tidak tercakup dalam data numerik. Untuk indikasi korupsi, dapat ditambahkan indeks persepsi korupsi atau skor integritas dari lembaga independen sebagai pelengkap data yudisial

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. F. (2018). Faktor Penentu Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 9(3).
- Amyulianthy, R., Muda, R., Said, J., Setyaningrum, D., & Harnovinsah, H. (2023). Can Good Governance Enhance Local Government Performance? *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 7(1).
- Antoni, S. (2024). *Kejati Sumbar selamatkan Rp1,6 miliar dari kasus korupsi di Dhamasraya*. Antara News.
- Arifin, & Kumalasari. (2019). Pengaruh Partisipasi Publik dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 3(12).
- Arsandi, S. A. (2022). The Grease of the Wheel: The Correlation between Corruption, Regional Revenue and Expenditure in Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(2).
- Auditya, L., & Lismawati, H. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1).
- Duatte, M. C. A. (2024). Pengaruh Good Government Governance terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Repository Universitas Negeri Malang*.
- Heriningsih. (2014). Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Jurnal Masalah Sosial Politik Dan Kebijakan*.
- Indriana. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1).
- Indriyani, O., & Amalia, D. (2023). The Effect of Local Government Size, Leverage, Audit Findings Follow-up of Audit Recommendations, and Audit Opinion On Local Government Performance. *Jurnal Akuntansi Dan Audit*.
- Irayana, U., Putri, A. M., & Agustiawan. (2024a). Pengaruh Penerapan Good Governance, Pengendalian Internal dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah yang di Moderasi oleh Komitmen Organisasi (Studi Pada Daerah Kabupaten Kampar). *Daya Saing*, 10(3).
- Irayana, U., Putri, A. M., & Agustiawan. (2024b). Pengaruh Penerapan Good Governance, Pengendalian Internal dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah yang dimoderasi oleh Komitmen Organisasi (Studi pada Daerah Kabupaten Kampar). *Daya Saing*, 10(3).
- Istiqomatunnisa, I., Tanjung, A., & Rusli, R. (2017). Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

- (Studi pada Skpd Kabupaten Siak). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 724–738.
- Kiswanto, & Fatmawati, D. (2019). Determinan Kinerja Pemerintah Daerah: Ukuran Pemda, Leverage, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 52.
- Listyasabila, F., & Januarti, I. (2025). *Pengaruh Hasil Pemeriksaan Bpk, Struktur Anggaran, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Diponegoro.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3).
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).
- Nugroho, Hidayat, & Susanto. (2018). Audit Findings and Local Government Performance: The Role of Follow-up Action Quality. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(4).
- Prasetyawati, V. D. (2024). *Pengaruh Karakteristik Kabupaten Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Jawa Timur*. Universitas Mercu Buana.
- Putra, E. P. (2022). *Kejari Padang Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Taman Budaya Sumatera Barat*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/r9lcyz484/kejari-padang-usut-dugaan-korupsi-pembangunan-taman-budaya-sumatera-barat>
- Riska, R., Yamin, N. Y., & Nurdin, J. (2022). Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(1), 77. <https://doi.org/10.24853/jago.3.1.77-86>
- Rumerung, Y. H., & Alexander, S. W. (2019). Analisis Kinerja Keuangan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3). <https://doi.org/10.32877/eb.v1i3.76>
- Sastra, Y. (2021). *Selidiki Dugaan Korupsi Rp 5,2 Miliar di Dinas PUPR Mentawai*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/06/07/selidiki-dugaan-korupsi-rp-52-miliar-di-dinas-pupr-mentawai>
- Setiyono. (2017). Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar dari Empat Studi Kasus. *Ilmu Politik*, 8(1).
- Tama, I. G. M. A. A., & Hadi, P. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Perspektif Akuntansi*, 1(1).
- Uthaylah. (2022). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019*. Universitas Jambi.
- Wahib, M. F. N., & Rohman, A. (2025). *Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Opini Audit Dengan Kerugian Daerah Sebagai Mediasi*. Universitas Diponegoro.
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The Effect of Regional Characteristics, Lavarage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, 9(1).
- Wulandari, & Prasetya. (2020). Good Governance dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(17).